

ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PANTI SOSIAL¹

Oleh: Dr. Ir. Harry Hikmat, MSi

A. Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), diarahkan kepada upaya penyelamatan, pemulihan dan kemandirian dalam mencapai taraf hidup kesejahteraan sosial yang layak, normatif dan manusiawi yang dilaksanakan melalui sistem Panti Sosial dan Non Panti Sosial.

Hasil yang telah dicapai melalui panti-panti sosial dirasakan belum optimal karena perkembangan jumlah dan sebaran permasalahan sosial jauh lebih cepat bila dibanding dengan daya jangkau, kapasitas dan kemampuan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh panti sosial milik pemerintah maupun masyarakat.

Walaupun adanya keterbatasan daya jangkau, kapasitas dan kemampuan pelayanan Panti Sosial, namun dengan mencermati perkembangan PMKS, keberadaan panti-panti sosial tetap strategis sebagai salah satu alternatif pelayanan kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam penanganan PMKS. Alasan utama panti sosial milik pemerintah memiliki posisi strategis, yaitu sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar warganya yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Dalam kondisi kemampuan sumber daya (sarana prasarana) yang terbatas dari pemerintah untuk menangani PMKS, upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti sosial selayaknya memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan, sehingga panti sosial milik pemerintah memiliki keunggulan komparatif sekaligus dapat menjadi model percontohan bagi pelayanan sejenis yang diselenggarakan oleh masyarakat/ swasta.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti sosial diperlukan perencanaan pengembangan yang dapat memberikan kejelasan arah kebijakan, strategi dan rencana pola pelayanan kesejahteraan sosial di Panti Sosial.

B. Lingkup tugas dan fungsi panti

Tugas dan tanggungjawab panti sosial mencakup empat kategori.

1. Panti bertugas untuk **mencegah** timbulnya permasalahan sosial penyandang masalah dengan melakukan deteksi dan pencegahan sedini mungkin
2. Panti bertugas melakukan **rehabilitasi sosial** untuk memulihkan rasa percaya diri, dan tanggungjawab terhadap diri dan keluarganya; dan meningkatkan kemampuan kerja fisik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kemandiriannya di masyarakat.
3. Panti bertugas untuk mengembalikan PMKS ke masyarakat melalui **penyiapan sosial**; penyiapan masyarakat agar mengerti dan mau menerima kehadiran kembali mereka; dan membantu penyaluran mereka ke pelbagai sektor kerja dan usaha produktif.
4. Panti bertugas melakukan **pengembangan** individu dan keluarga, seperti mendorong peningkatan taraf kesejahteraan pribadinya; meningkatkan rasa tanggungjawab sosial untuk berpartisipasi aktif di tengah masyarakat; mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan iklim yang mendukung pemulihan; dan memfasilitas dukungan psiko-sosial dari keluarganya.

Selanjutnya, panti sosial memiliki beberapa fungsi utama, antara lain: sebagai tempat penyebaran layanan; pengembangan kesempatan kerja; pusat informasi kesejahteraan sosial; tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi tempat di bawahnya (dalam sistem rujukan/*referral system*) dan tempat pelatihan keterampilan.

Gambaran tanggungjawab dan fungsi panti-panti sosial di atas jelas sangat strategis. Namun, hal-hal tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik jika seluruh komponen yang terlibat dalam manajemen panti, sumber daya profesional yang ada di dalamnya, sarana

¹ Makalah ini disusun berdasarkan pengalaman penulis meneliti panti-panti sosial di DKI Jakarta, sebagai konsultan Dinas Sosial Binal Kesos tahun 2003 s.d 2005; panti sosial di Jabar thn 1990 s.d 1995; panti sosial di Jateng dan Sulut thn 2006; panti sosial di Jatim 2000

dan prasarananya, serta teknologi yang dimilikinya sudah sesuai dengan tingkat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi.

C. Analisis Kesenjangan

Kondisi umum panti menunjukkan sejumlah keterbatasan, baik kemampuan dan jumlah SDM, sarana dan prasarana, administrasi kasus dan program rehabilitasi. Semua keterbatasan tersebut pada gilirannya dapat menurunkan kapasitas dan kapabilitas panti sosial dalam menjalankan fungsi rehabilitasi yang sangat penting bagi pemulihan kondisi klien. Usaha rehabilitasi yang diharapkan dapat dilakukan panti mencakup pembinaan, pengembangan dan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai upaya pengentasan para PMKS hingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

Arah pengembangan panti-panti sosial perlu dibangun berdasarkan pemahaman yang terperinci mengenai kesenjangan antara tuntutan fungsional panti dengan kapasitas dan kapabilitas kelembagaannya. Untuk itu analisa terhadap lingkup tugas dan tanggungjawab panti sosial dihadapkan dengan kondisi riil panti-panti yang ada menjadi suatu pijakan penting. Penting digarisbawahi di sini bahwa tugas/tanggungjawab dan fungsi panti-panti social, sesungguhnya sangat besar. Yakni sebagai lembaga:

- Pencegahan
- Rehabilitasi
- Penyiapan Sosial
- Pengembangan

Sedangkan fungsi sosialnya mencakup:

- Pelayanan langsung
- Pengembangan layanan
- Pusat informasi kesejahteraan sosial;
- Tempat rujukan

Sayangnya, tanggungjawab dan fungsi besar tersebut jelas belum dapat dipenuhi oleh panti-panti sosial yang ada. Masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara tugas dan fungsi yang besar dengan kemampuan kelembagaan, program dan SDM. Untuk memberikan gambaran yang lebih mendekati mengenai kesenjangan tersebut berikut ini adalah hasil analisa kesenjangan yang dirangkum di dalam matrik:

Dimensi	Kondisi yang ada	Kondisi yang diharapkan
Program	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program lebih banyak bersifat pemeliharaan dan pelayanan langsung; ✓ Program rehabilitasi dan pengembangan belum dilakukan secara teratur ✓ Pengelompokan klien masih belum pas (misal masih didasarkan pada perilakunya) ✓ Kerjasama dengan pihak luar untuk reintegrasi (resosialisasi dan fasilitasi kerja) belum melembaga; ✓ Belum melakukan sosialisasi informasi dan pendidikan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya perencanaan intervensi yang spesifik untuk tiap jenis masalah yang diderita klien ✓ Rencana dibuat sangat spesifik sesuai tingkat keseriusan masalah, jenis kelamin dan usia klien ✓ Program mencakup pelayanan kesehatan fisik, rehab psikologis, dan rehab prilaku; ✓ Adanya usaha merekam perkembangan harian, mingguan dan bulanan klien melalui mekanisme manajemen kasus; ✓ Koordinasi pelayanan rehabilitasi antara tim-tim profesional yang ada; ✓ Adanya jaringan kerjasama program dengan lembaga serupa atau yang terkait; ✓ Adanya usaha penerangan kepada masyarakat mengenai masalah kesehatan mental; ✓ Adanya program kerjasama dukungan psiko-sosial dengan keluarga klien. ✓ Ada usaha peningkatan kualitas staf melalui program-program pelatihan

Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tenaga yang bekerja di panti belum terspesialisasi; ✓ jumlah tenaga belum proporsional berbanding jumlah kasus dan tingkat keseriusan masalah ✓ Tingkat dan latar belakang pendidikan tenaga panti belum memadai (Mayoritas masih SLTA ke bawah, atau Sarjana di luar bidang-bidang yang terkait) ✓ Belum ada program pengembangan profesi, keterampilan dan pengetahuan bagi staf yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memiliki tim profesional yang multidisiplin. Mereka diharapkan berkantor secara rutin di panti-panti bina laras: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan social 2. Psikiater/psikolog 3. Dokter 4. Perawat 5. Pendidik 6. Ahli keterampilan ✓ Jumlahnya proporsional (1 orang professional : 5-10 klien). ✓ Memiliki tenaga tambahan untuk tugas-tugas administrasi, kebersihan, juru masak, dll. ✓ Mampu melakukan management kasus
Sarana/prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kapasitas sarana masih lebih kecil ketimbang jumlah kasus; ✓ Sarana hiburan dan olahraga belum cukup bervariasi ✓ Ruang perawatan/rehab belum dirancang untuk menstimulasi kesadaran ✓ Alat transportasi belum memadai ✓ Peralatan keamanan bagi tenaga profesional belum memadai; ✓ Pemilahan blok-blok barak penampungan belum diklasifikasi sesuai dengan tipe dan tingkat keseriusan masalah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah kasus disesuaikan dengan kapasitas sarana dan tenaga profesional yang ada; ✓ Adanya fasilitas hiburan, rekreasi dan olah raga yang dibuat dalam rangka rehabilitasi mental ✓ Ruang perawatan diklasifikasi sesuai dengan tingkat keseriusan masalah, kelompok umur dan jenis kelamin; ✓ Pada setiap panti tersedia kendaraan operasional untuk transportasi klien dan tenaga profesional; ✓ Peralatan keamanan bagi staf dan tenaga profesional perlu dilengkapi; ✓ Setiap panti memiliki jalur komunikasi langsung dengan instansi keamanan, pemadam kebakaran dan rumah sakit; ✓ Setiap panti dilengkapi dengan sistem alarm dan kamera monitor untuk mengamati perilaku klien
Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perangkat administrasi perkantoran (mesin tik, komputer, filing cabinet) masih terbatas; ✓ Informasi tentang kasus-kasus individual klien belum terdokumentasi dengan baik; ✓ Rapat-rapat koordinasi dan evaluasi rutin program belum banyak dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peralatan kantor perlu di perbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga profesional yang ada; ✓ Setiap satu orang profesional diharapkan sudah memiliki satu unit komputer yang saling terhubung dengan server inti di panti; ✓ Panti memiliki akses pada jaringan internet; ✓ Kamera video, alat perekam dan foto sebainya tersedia untuk mendokumentasikan perkembangan perilaku klien. ✓ Informasi tentang perkembangan kasus setiap klien terdokumentasikan baik secara manual maupun elektronik; ✓ Rapat rapat koordinasi dan evaluasi program dilakukan secara rutin, sedikitnya dua minggu sekali.

Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum adanya aturan tentang koordinasi tim professional dari beberapa instansi; ✓ Belum adanya aturan tentang standardisasi jenjang dan kualifikasi pendidikan tenaga profesional di panti; ✓ Belum ada kebijakan kerjasama langsung dengan perguruan tinggi untuk kegiatan kajian dan pengembangan; ✓ Belum adanya kebijakan tentang proporsi alokasi anggaran untuk aspek kesejahteraan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya Perda tentang pembentukan tim multidisiplin yang memberikan pelayanan langsung di panti; ✓ Adanya aturan hukum baik dalam bentuk Peraturan Menteri, keputusan Gubernur atau Perda tentang Jenjang karir dan kualifikasi tenaga profesional yang bekerja pada panti-panti sosial; ✓ Adanya MOU antara Dinas Sosial dengan perguruan tinggi untuk penelitian dan pengembangan program di Panti Sosial ; ✓ Adanya kebijakan tentang peningkatan anggaran untuk pelayanan kesejahteraan sosial
-----------	---	--

D. Analisis Stakeholders

Dalam konteks merumuskan model pengembangan ideal yang memberikan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), analisis stakeholder merupakan bagian strategis. Dikatakan strategis karena analisis stakeholder akan memberikan bahan dasar bagi workplan untuk mengembangkan Panti yang memberikan pelayanan kepada PMKS. Berdasarkan analisis seperti itu, maka pengembangan panti dapat dilakukan secara lebih terukur dan terencana.

Penanganan klien di Panti-panti Sosial perlu mempertimbangkan pentingnya koordinasi dengan pihak-pihak lain. Disamping memberikan pelayanan langsung kepada klien, panti juga berfungsi melakukan mengkoordinasi lintas stakeholders yang semuanya memiliki peran dan kontribusi penting dalam upaya pemulihan kondisi klien. Dengan kata lain, penanganan klien harus dilakukan dengan kerangka multisistem (*multisystemic approach*).

Pendekatan multisistemik memandang bahwa masalah klien tidak semata-mata ditangani oleh satu pihak yang dipandang paling "bertanggungjawab". Sebaliknya, pendekatan ini menyadari bahwa penyebab masalah adalah sangat kompleks, sehingga harus ditangani oleh suatu pendekatan yang lintas dan multi sistemik. Panti pada dasarnya lebih berorientasi pada penanganan aspek psiko-sosialnya dan usaha rehabilitasi prilaku dan penyiapan sosial. Namun, agar program tersebut dapat dilakukan, diperlukan penanganan medis, pendidikan, psikologis, dll. Dukungan keluarga dan lingkungan juga diperlukan dalam proses kuratif. Tetapi semua program tersebut hanya mungkin dapat dilaksanakan jika sistem sosial di luarnya, seperti kebijakan, penganggaran, dan lembaga-lembaga masyarakat memberi dukungan memadai bagi proses tersebut. Dengan demikian, koordinasi lintas sektoral dan lintas sistem dipandang sebagai pendekatan yang saat ini sangat dibutuhkan dalam sistem pelayanan sosial di panti.

Jika dipetakan secara lebih terinci, terdapat sejumlah stakeholders yang menjadi jaringan utama panti. Jaringan tersebut dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni kelompok stakeholders primer; kelompok stakeholders sekouder; dan kelompok stakeholders tersier.

1. Kelompok stakeholder primer

Pihak-pihak yang termasuk kelompok ini antara lain:

- ❖ Pengelola panti
- ❖ Dinas Sosial
- ❖ Masyarakat sekitar panti
- ❖ Keluarka Klien
- ❖ Dinas Kesehatan

Dalam mengembangkan pelayanan bagi klien, koordinasi dan kerjasama antara kelompok stakeholders primer akan sangat menentukan keberhasilan program. Pengelola panti diharapkan dapat memberi pelayanan langsung khususnya kepada klien dengan memaksimalkan dukungan dari dinas sosial, masyarakat sekitar panti, keluarga klien dan dinas kesehatan. Definisi pembagian kerja, dan perincian fungsi dan peran masing-masing akan memungkinkan kerjasama dilakukan secara lebih profesional.

2. Kelompok stakeholder sekunder

Pihak-pihak yang termasuk kelompok ini antara lain:

- ❖ Bappeda
- ❖ Ortala
- ❖ DPRD
- ❖ Departemen Sosial

Kelompok ini akan memastikan bahwa program-program pelayanan yang dilakukan panti dengan bekerjasama dengan jaringan stakeholder primer dapat berjalan dengan baik. Program yang dirancang hanya mungkin bisa dilakukan sesuai rencana jika hal tersebut didukung oleh Bappeda dan dimasukkan ke dalam program pelayanan sosial penting. Kekuatan kelembagaan dan ketersediaan tenaga profesional di dalam panti memerlukan dukungan dari biro organisasi dan tata laksana Pemda. Secara lebih makro, usaha-usaha pengembangan kualitas layanan panti ini sangat tergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memberikan dukungan politis melalui Peraturan-peraturan Daerah (PERDA) yang sesuai dengan rencana pengembangan. Dalam kaitan ini, Departemen Sosial, sebagai mitra kerja Dinas Sosial di pemerintahan tingkat pusat dapat memberi kontribusi penting dalam memberikan petunjuk dan standardisasi pelayanan yang berkualitas.

3. Kelompok stakeholder tersier

Pihak-pihak yang termasuk kelompok ini antara lain:

- ❖ Perguruan Tinggi
- ❖ LSM/Ormas
- ❖ Sektor Swasta

Lembaga-lembaga di atas merupakan perwakilan dari kelompok-kelompok kepentingan masyarakat yang akan menjadi mitra Dinas Sosial. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi akan memberi sumbangan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan, pengembangan kebijakan sosial, pengembangan kajian dan pengembangan model-model inovatif dalam pelayanan sosial. Organisasi masyarakat dan LSM diharapkan juga dapat menjadi mitra Dinas Sosial dan Panti Sosial dalam melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sosialisasi dan pendidikan mengenai masalah sosial, khususnya masalah kesehatan mental, dapat dilakukan bersama Ormas/LSM dan Perguruan Tinggi, sehingga menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Sektor Swasta belakangan semakin berperan penting dalam pengembangan kesejahteraan sosial. Mereka memiliki potensi keahlian dan sumber dana yang cukup potensial menjadi mitra kerja Panti Sosial yang prospektif di masa depan.

Stakeholder panti di dalam analisis ini dibagi ke dalam tiga kelompok besar. Ketiga kelompok tersebut adalah:

Stakeholders	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan Jangka Pendek	Kondisi yang Diharapkan Jangka Menengah	Kondisi yang Diharapkan Jangka Panjang
A. Primary				
1. Pengelola Panti	<p>Mengelola Panti secara konvensional.</p> <p>Tidak memiliki tenaga profesional (pekerja sosial, psikiater/psikolog, perawat) yang langsung berada di bawah Panti.</p> <p>Tidak menerapkan pendekatan multidisiplin dalam menangani klien.</p> <p>Kasus-kasus dan perkembangannya belum terdokumentasikan dengan baik</p> <p>Tidak melakukan diagnosis terhadap klien</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan dengan pelatihan-pelatihan.</p> <p>Menegaskan kerjasama dengan Dinas Kesehatan agar tenaga medik secara rutin datang ke panti.</p> <p>Mengundang kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan masalah resosialisasi masyarakat (dokter, pekerja sosial, dan ulama/ahli agama).</p> <p>Adanya tenaga medis dan psikiater yang memadai.</p>	<p>Ada program pelatihan rutin untuk meningkatkan kualitas pegawai secara berjenjang.</p> <p>Adanya kerjasama program dengan perguruan tinggi atau organisasi profesi</p> <p>Terbangunnya sistem informasi dan manajemen kasus pada tingkat panti</p> <p>Memiliki perpustakaan yang mengoleksi buku-buku terkait dengan kesehatan mental</p>	<p>Buku pedoman baku mutu pelayanan panti bisa diakses oleh semua yang bekerja di panti.</p> <p>Terdapat tenaga medik dan psikiater di dalam panti.</p> <p>Tenaga-tenaga profesional ini merupakan pegawai Dinas Kesehatan yang ditugaskan di panti.</p> <p>Melakukan klasifikasi klien secara tegas sesuai dengan jenis penyakit yang diidapnya berdasarkan standar ilmiah.</p>
2. Dinas Sosial	<p>Tidak memiliki buku petunjuk teknis tentang standar baku pengelolaan panti.</p> <p>Kurang mendorong lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan Panti.</p>	<p>Berkordinasi dengan Depsos dan lembaga-lembaga lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan panti.</p> <p>Mengevaluasi dan menganalisa kinerja pelayanan panti-panti sosial</p>	<p>Rekrutmen tenaga-tenaga profesional multidisiplin yang diperlukan panti. Antara lain Pekerja Sosial, Dokter, Psikiater, Perawat)</p> <p>Merumuskan standar kualitas akademik dan</p>	<p>Merumuskan buku petunjuk teknis pengelolaan panti.</p> <p>Merekrut sarjana kesejahteraan sosial sebagai tenaga fungsional panti.</p> <p>Mengembangkan program-program pelatihan gelar untuk</p>

	<p>Belum memiliki standard tenaga profesional yang bekerja di panti</p> <p>Belum memiliki sistem koordinasi kerja yang jelas dengan dinas-dinas terkait.</p>	<p>yang ada</p> <p>Menganalisa kemungkinan adanya Permen, Perda atau Keputusan Gubernur mengenai standar rekrutmen tenaga profesional untuk panti</p> <p>Memperkuat kerjasama dengan Dinas-dinas terkait, khususnya Dinas Kesehatan</p>	<p>profesional tenaga panti.</p> <p>Kerjasama multidisiplin dengan tenaga-tenaga profesional sudah memiliki landasan hukum</p>	<p>tenaga profesional di panti</p>
3. Masyarakat Sekitar	<p>Memandang Panti sebagai lembaga tertutup yang tidak melibatkan masyarakat.</p> <p>Enggan berkunjung dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan Panti.</p> <p>Kurang memberikan dukungan terhadap kegiatan resosialisasi Panti.</p>	<p>Bersedia berkunjung dan menerima kehadiran klien masalah kejiwaan baik di panti maupun di sekitar panti.</p> <p>Terlibat dalam kegiatan-kegiatan panti.</p>	<p>Menyediakan dan menyebarkan informasi yang benar mengenai pasien masalah kejiwaan</p> <p>Membangun kerjasama program pengembangan masyarakat antara dinas sosial dengan masyarakat sekitar panti</p>	<p>Terlibat dalam program resosialisasi yang dilakukan panti.</p> <p>Menjadikan masyarakat panti sebagai lingkungan pembelajaran bagi klien untuk kembali membaur di masyarakat</p>
4. Keluarga Klien	<p>Kurang/tidak mengakui keluarga yang dirawat dalam Panti.</p> <p>Kurang/tidak memberi dukungan (<i>support</i>) kepada "kesembuhan" klien.</p>	<p>Mengakui keluarga yang dirawat di panti.</p> <p>Memberi support terhadap klien untuk kepentingan "penyembuhan".</p> <p>Melakukan pendataan keluarga klien yang ada di panti-panti</p>	<p>Dinas Sosial memberikan pendidikan kepada masyarakat secara intensif mengenai masalah kesehatan mental</p> <p>Membangun komunikasi dan kerjasama dengan keluarga melalui wadah bersama antara tenaga profesional panti dengan keluarga</p>	<p>Mengakui dan memberikan informasi lengkap tentang klien.</p> <p>Menerima kembali klien yang sudah mulai pulih dan membantunya berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat</p>

5. Dinas Kesehatan	<p>Tidak menempatkan tenaga profesional medik di dalam Panti.</p> <p>Kurang membangun kerjasama kelembagaan dengan Dinas Sosial.</p>	<p>Menjadwalkan kembali kunjungan tenaga medik ke panti agar lebih sering dan rutin.</p> <p>Membangun komunikasi lebih intensif dengan Dinas Sosial.</p>	<p>Menugaskan tenaga medik untuk memnerikan pelayanan rutin di panti.</p> <p>Merintis sistem jaringan dan rujukan antara panti dengan rumah sakit-rumah sakit</p>	<p>Adanya kerjasama kelembagaan yang lebih kuat dengan Dinas Sosial untuk penempatan tenaga profesional di panti</p> <p>Terbangunnya sistem rujukan bersama antara panti dengan rumah sakit atau puskesmas pemerintah</p>
B. Secondary				
1. Bapeda	<p>Anggaran pengembangan fasilitas panti masih terbatas</p> <p>Anggaran untuk peningkatan SDM panti belum memadai</p> <p>Anggaran untuk program sosialisasi dan pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan</p>	<p>Membuat perincian program yang dilakukan di panti-panti</p> <p>Menyiapkan kebutuhan program bagi peningkatan SDM panti,</p> <p>Program sosialisasi dan penyediaan informasi kepada masyarakat diintegrasikan ke dalam program rutin panti</p>	<p>Penyediaan anggaran untuk merekrut tenaga profesional langka tidak tetap</p> <p>Adanya peningkatan anggaran secara sistematis dan gradual</p> <p>Adanya pertemuan rutin pembahasan perencanaan pada tingkat panti</p>	<p>Adanya inisiatif panti dan Dinas Sosial untuk mengusulkan program-program</p> <p>Adanya program-program yang berkelanjutan sesuai dengan perencanaan jangka menengah pemerintah daerah</p>
2. Ortala	<p>Posisi struktural kepala panti belum memberikan otonomikebijakan</p> <p>Janjang karir jabatan</p>	<p>Meningkatkan eselon ketua panti sehingga memberikan keleluasaan untuk melakukan kerjasama</p>	<p>Ketua panti minimal setingkat eselon II</p> <p>Adanya peraturan tentang prosedur kenaikan pangkat</p>	<p>Dengan posisi kepala panti setingkat eselon II, ia akan memiliki kewenangan yang lebih baik dalam</p>

	fungsi profesional tenaga panti perlu diperkuat	dengan pihak-pihak lain. Adanya panduan perkembangan karir tenaga profesional	tenaga profesional sebagaimana di Departemen Sosial	pengembangan panti Profesional yang ada di panti memiliki kepastian karir
3. DPRD	Belum ada Perda yang menekankan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam penanganan klien. Perda yang ada kurang jelas dalam hal pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing instansi dalam penanganan klien. Belum ada Perda tentang Peran Pemerintah mencapai tujuan pembangunan milenium	Melakukan peninjauan ulang terhadap perda-perda terkait dengan usaha kesejahteraan sosial Melakukan kajian bersama Dinas Sosial tentang masalah-masalah kesejahteraan sosial Menggali informasi tentang potensi pengembangan kesejahteraan sosial	Menyediakan Perda yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan panti. Memperjuangkan peningkatan anggaran pengelolaan panti. Membuat Perda tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, khusus bidang kemiskinan dan panti sosial sebagai salah satu icon pembangunan	Adanya perda baru tentang pembagian tugas dan kewajiban antar instansi dalam usaha rehabilitasi klien; Adanya dorongan untuk peningkatan investasi anggaran di bidang kesejahteraan sosial Adanya Perda tentang pencapaian tujuan pembangunan millenium
4. Departemen Sosial	Kerjasama kelembagaan belum terbangun dengan baik Ada kesan perbedaan antara program pemerintah daerah dan pemerintah pusat	Memberikan panduan umum standar pelayanan, dukungan kebijakan pengembangan, fasilitasi jaringan Membangun koordinasi dan kerjasama program	Kegiatan koordinasi antara Dinas Sosial dengan Departemen Sosial dilakukan secara berkala Memberikan asistensi teknis dan tenaga ahli untuk pengembangan program di Dinas dan panti	Terbangunnya sinergi program pengembangan kesejahteraan antara pemerintah pusat dan daerah Adanya standar pelayanan dan dukungan kebijakan bagi Dinas Sosial

C. Tertiary				
1. Perguruan Tinggi	<p>Kerjasama dengan perguruan tinggi masih insidental</p> <p>Perguruan tinggi belum memberikan masukan kepada Dinas Sosial dan Panti mengenai perbaikan layanan dan kebijakan secara terprogram</p>	<p>Merintis kerjasama pengembangan program antara PT-Dinas/Panti</p> <p>Mengadakan pertemuan ilmiah bersama mengenai pemberdayaan Panti-panti sosial</p>	<p>Adanya kerjasama terlembaga antara PT-Dinas/Panti</p> <p>Adanya pertemuan ilmiah dan kajian kebijakan secara berkala antara PT dengan Dinas/Panti</p>	<p>Terbangunnya sinergi antara PT, khususnya yang memiliki pendidikan Kesejahteraan Sosial, dengan Dinas Sosial</p> <p>Terbangunnya iklim kerjasama akademik, kajian dan pengembangan kebijakan</p>
2. LSM/Organisasi Sosial Masyarakat/ sektor swasta	<p>Sektor swasta, LSM dan Organisasi Masyarakat belum memberi dukungan maksimal bagi peningkatan kualitas layanan sosial</p> <p>Tradisi kerelawanan belum berkembang dengan baik</p>	<p>Ada upaya melakukan penjajakan awal dengan pihak LSM-Swasta dan Organisasi masyarakat</p> <p>Memfasilitasi kegiatan menjaring relawan dari LSM-Swasta dan Ormas</p>	<p>Merintis kerjasama formal pengembangan pelayanan sosial</p> <p>Mengorganisasikan relawan kesejahteraan sosial</p>	<p>Pengembangan program kerjasama formal dengan antara Dinas Sosial dengan Swasta, LSM dan Organisasi Masyarakat;</p> <p>Pelebagaan tradisi kerelawanan dari masyarakat untuk membantu pengembangan program layanan sosial</p>

E. Alternatif Pola Pelayanan

Menurut pengalaman pelaksanaan program yang selama ini ada, terdapat dua pola pelayanan yang mungkin dapat dikembangkan. Pertama, pola pelayanan terpisah, dan pola pelayanan terpadu. Pelayanan terpisah dilakukan dengan cara pengelompokan pelayanan pada sasaran yang dianggap berbeda. Sementara pelayanan terpadu dilakukan dengan mengembangkan tahap-tahapan program dan layanan di dalam satu lokasi yang sama.

Kekuatan dan kelemahan model terpisah: Kekuatan model pelayanan terpisah antara lain bahwa panti memiliki spesialisasi penanganan dan hanya berkonsentrasi pada satu tugas utama. Tetapi kelemahan dasarnya adalah sulitnya mengukur tingkat perubahan pola perilaku klien dari satu tahap ke tahap lainnya. Kerjasama multidisiplin antara pelbagai kelompok profesional juga terasa agak sulit dilakukan. Hal ini menyebabkan sulitnya membuat distingsi tahapan, sebagaimana dibayangkan di dalam konsepnya, dari satu fase rehabilitasi ke fase berikutnya.

Pola pelayanan terpadu mengasumsikan fasilitas (sarana dan prasarana) yang dimiliki panti sosial cukup komprehensif dan memadai. Di dalam satu panti sosial terdapat fasilitas pelayanan yang dibedakan menurut fungsi dan tugas pokoknya. **Kekuatan dan kelemahan model terpadu:** Kekuatan model terpadu terletak, terutama, pada aspek manajemen kasusnya (*case management*) dan kerjasama tim multidisiplin yang memungkinkan proses rehabilitasi perilaku klien bisa dilakukan secara sistematis. Perubahan perilaku dan peningkatan kemampuan klien dalam mengontrol gejala masalah akan mudah diidentifikasi dari satu tahap ke tahap lain. Namun demikian, kelemahan model terpadu ini adalah bahwa ia mengandaikan adanya dukungan sarana dan prasarana panti yang memadai dan ketersediaan tenaga profesional multidisiplin.

Kekuatan dan kelemahan pola terpisah dan terpadu

Prasyarat/Kebutuhan	Pola 1: Terpisah	Pola 2: Terpadu
Program	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dirancang secara terpisah ✓ Fokus pada satu gejala ✓ Program terpisah-pisah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dirancang secara integratif ✓ Fokus pada perkembangan ✓ Pelayanan saling terkait dengan program lain
Sarana/Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hanya menyediakan untuk satu jenis klien ✓ Fasilitas tidak dibeda-bedakan (kecuali secara seksual) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disediakan untuk beberapa kelompok klien ✓ Fasilitas dibedakan menurut tingkat masalahnya (juga secara seksual) ✓ Satu unit dengan unit lainnya saling terhubung
Tenaga Profesional yang Dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tenaga profesional hanya diperkuat sesuai fungsi khusus panti (misal medik, rehab dan mandiri) ✓ Proporsi antara klien dengan profesional belum seimbang 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tim profesional multidisiplin tersedia di dalam panti (baik bidang penanganan awal, rehabilitasi dan persiapan sosial) ✓ Proporsi tenaga profesional dengan klien lebih seimbang
Partner Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tenaga medis (dokter) atau perawat tidak teratur ✓ Kerjasama dengan dinas kesehatan belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tenaga medis (dokter) dan perawat ada di panti secara teratur dan dinas kesehatan menugaskan mereka secara khusus di panti ✓ Tenaga profesional pekerja sosial dan psikolog bekerja secara penuh waktu ✓ Dinas tenaga kerja dan trans ikut membantu proses persiapan sosial klien

Model Manajemen Kasus dan rujukan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Manajemen kasus masih terpecah-pecah dari satu panti ke panti lain ✓ Administrasi hanya terbatas pada fungsi pokoknya yang terbatas ✓ Sistem informasi perkembangan klien belum terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Manajemen kasus dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan ✓ Administrasi kegiatan dilakukan secara terpadu untuk unit-unit yang berbeda ✓ Sistem informasi dan basis data perkembangan klien mulai terbangun
-----------------------------------	---	---

F. Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

Proses supervisi, monitoring dan evaluasi program yang berlangsung secara berkala. Ketiga proses ini akan memastikan bahwa pelayanan dilakukan secara profesional, mengikuti prosedur dan tahapan proses secara konsisten dan memberikan umpan balik positif bagi usaha perbaikan pelayanan.

1. Supervisi

Supervisi dilakukan dalam kerangka kerja profesional antara petugas pelayanan di panti dengan tenaga yang lebih ahli (supervisor). Supervisor membantu tenaga pelayanan sosial di panti untuk mengatasi dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam pelayanan; memberikan bantuan pengetahuan dan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas personel; dan membantu mereka agar mampu mencapai tujuan-tujuan pelayanan di panti. Dengan demikian, semua proses pelayanan di panti dapat dilaksanakan secara efektif sesuai rencana.

Supervisi umumnya dilakukan baik di lokasi tempat pelayanan. Supervisor perlu terlebih dahulu memahami situasi dan kondisi pelayanan yang sudah berlangsung melalui observasi dan pengamatan yang mendalam. Wawancara terhadap sejumlah staf profesional, klien dan keluarganya akan membantu supervisor memahami masalah secara baik.

2. Monitoring

Pemantauan (*monitoring*) adalah suatu proses pelacakan terhadap proses perkembangan pelaksanaan pelayanan untuk memahami capaian-capaian, masalah-masalah yang dihadapi dan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Usaha monitoring penting dilakukan untuk memastikan bahwa masalah-masalah yang muncul atau penyimpangan-penyimpangan dapat diidentifikasi sedini mungkin sehingga dapat diselesaikan dengan cepat tanpa mengganggu pencapaian tujuan secara umum.

Kegiatan monitoring dilakukan oleh tenaga pemantau di lokasi pelaksanaan program. Pemantauan biasanya dilakukan dengan menggunakan instrumen khusus yang berisi indikator-indikator keberhasilan program dan indikator-indikator masalah. Pengumpulan data dapat dilakukan baik melalui pengisian kuesioner, wawancara langsung dengan pelaksana dan penerima manfaat program atau diskusi kelompok terfokus. Hasil-hasil dari monitoring selanjutnya digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap unjuk kerja pelayanan.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah sebuah kegiatan penilaian terhadap kinerja dan unjuk kerja dari proses dan hasil pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi dilakukan terutama untuk mengetahui sejauhmana tujuan program tercapai atau belum. Standar penilaian adalah indikator-indikator keberhasilan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan kegiatan. Penilaian didasarkan pada informasi empiris yang diperoleh melalui kegiatan monitoring. Hasil evaluasi akan memberikan kata akhir terhadap suatu kegiatan, apakah dinilai berhasil, kurang berhasil atau gagal.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah suatu kegiatan penyampaian informasi kegiatan baik pada tahap perencanaan, proses pelaksanaan dan akhir kegiatan. Pelaporan memberikan gambaran menyeluruh pada setiap komponen dan tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan umumnya disusun tiga kali dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan. Pertama, laporan pendahuluan berisi tentang rencana pelaksanaan kegiatan, teknis pelaksanaan dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kedua, laporan perkembangan, berisi tentang proses pelaksanaan kegiatan, capaian-capaian sementara, masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi, dan rencana lanjutan penyelesaian kegiatan. Ketiga laporan akhir yang berisi deskripsi dan analisis atas seluruh proses kegiatan dan menjelaskan apakah tujuan yang ditetapkan di awal tercapai pada akhir kegiatan. Penyusunan laporan ini biasanya dilakukan oleh pelaksana kegiatan.

G. Penataan Jangka Pendek (2006 – 2008)

Penataan program pelayanan yang berimplikasi adanya pengelompokan jenis pelayanan, berdasarkan prinsip optimalisasi efisiensi, efektivitas dan keberlangsungan pelayanan. Berdasarkan 3 hal tersebut, maka kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dalam jangka pendek :

- 1) Penyusunan rencana teknis pengembangan setiap Panti Sosial
- 2) Penyusunan profil lengkap seluruh Panti Sosial
- 3) Kategorisasi disfungsi sosial klien (Misal : kategori mampu realiasi diri, mampu menjalin relasi sosial, mampu latih, mampu produktif dan mampu menampilkan peran-peran sosial)
- 4) Diferensiasi jenis pelayanan berdasarkan disfungsi sosial klien, termasuk standar kurikulum yang memuat tata cara untuk melaksanakan rehabilitasi sosial dan resosialisasi serta sosialisasi pada masyarakat.
- 5) Rehabilitasi fisik bangunan dan sarana prasarana Panti Sosial sesuai dengan diferensiasi pelayanan.
 - a. Penataan ruang perawatan harus dapat membedakan antara kategori disfungsi sosial dengan yang sudah berfungsi sosial.
 - b. Penataan ruang juga dibedakan berdasarkan kelompok umur anak, remaja, dewasa dan lanjut usia
 - c. Dilengkapi dengan ruang poliklinik, rumah dinas dokter/ paramedis, ruang bimbingan sosial kelompok, ruang case conference, ruang konseling, ruang isolasi.
- 6) Penyesuaian struktur organisasi (termasuk segera merevisi struktur organisasi dan tata kerja panti sosial)
- 7) Pengkajian dan penetapan standar pelayanan Panti Sosial.
- 8) Peningkatan kualitas SDM dan penetapan jabatan fungsional pekerjaan sosial serta profesi lainnya yang diperlukan Panti Sosial
- 9) Pelatihan-pelatihan pekerjaan sosial spesialis
- 10) Penyusunan indikator dan instrumen kinerja pelayanan PSBL (terutama indikator outcomes dan impacts)
- 11) Peningkatan kerjasama dengan stakeholder dan pemerintah daerah asal pengirim

H. Penataan Jangka Menengah (2009 – 2012)

Secara bertahap perlu diperkuat sistem pelayanan kesejahteraan sosial setelah adanya penetapan yang jelas kategorisasi sasaran pelayanan yang berimplikasi pada diferensiasi fungsi panti sosial.

Untuk dapat meningkatkan fungsi pelayanan panti sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial, maka diperlukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana induk pengembangan setiap panti sosial, yang mengarahkan perluasan fungsi pelayanan dari pencegahan, pemulihan/ rehabilitasi, pemberdayaan, reintegrasi, sampai perlindungan sosial.
- 2). Peningkatan kualitas profesional SDM, yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan berbagai bidang teknis dan administratif.
- 3) Standarisasi panti-panti sosial
 - a. Standarisasi program pelayanan
 - b. Standarisasi SDM

- c. Standarisasi manajemen dan administrasi pelayanan
- d. Standarisasi sarana prasarana
- 4) Penetapan dasar hukum standar pelayanan, agar pedoman standar pelayanan mempunyai kekuatan, dalam menentukan pengembangan program dan anggaran, serta sistem pelayanan panti memperoleh prioritas dalam perencanaan pembangunan.
- 5) Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga
- 6) Peningkatan Partisipasi dan Perlindungan Sosial Komunitas Lingkungan Panti dan Masyarakat
- 7) Pemantapan keterpaduan pelayanan lintas bidang program kesejahteraan sosial dan lintas sektoral.
- 8) Peningkatan mutu sarana prasarana penunjang

I. Penataan Jangka Panjang (2012 – 2020)

1. Membangun sistem pelayanan kesejahteraan sosial secara terpadu menjadi pusat pelayanan kesejahteraan sosial / care management centre
2. Peningkatan fungsi-fungsi pelayanan melalui pusat pelayanan kesejahteraan sosial, dengan meningkatkan kapasitas program antara lain:
 - o Program Penjangkauan (outreach program)
 - o Program Manajemen Kasus (cases management program)
 - o Program Perlindungan Sosial (social protection program)
 - o Program Jaminan Sosial (social security program)
 - o Program Penguatan Keluarga (family support program)
 - o Program Pemberdayaan Masyarakat (community empowerment program)
 - o Program hubungan kerjasama antara lembaga dan jaringan kerja (networking program)
 - o Program pengembangan sistem informasi pelayanan kesejahteraan sosial
 - o Program pendidikan, penelitian dan pengembangan
3. Pemantapan keterpaduan pelayanan lintas sektor dan lintas batas/daerah.
4. Pengembangan jaringan kerja dan kemitraan dengan stakeholder

Seluruh rangkaian rencana pengembangan program penataan panti sosial membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun demikian segala akibat pembiayaan yang ditimbulkan dari pelaksanaan pengembangan program harus dianggap sebagai investasi pemerintah dalam program perlindungan sosial bagi PMKS melalui Panti Sosial dan merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi dan melindungi hak warga negaranya yang kurang mampu dan sulit ditangani oleh keluarga dan masyarakat.

Panti-panti sosial milik pemerintah pada masa yang akan datang selayaknya diarahkan sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima dan memberikan contoh yang telah distandardisasi bagi masyarakat/ swasta yang akan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang sejenis. Fungsi pusat pelayanan kesejahteraan sosial:

- Memberikan berbagai jenis pelayanan pencegahan, pemulihan, reintegrasi, perlindungan dan pengembangan serta menjadi sistem pendukung pelayanan sosial lainnya
- Menjadi pusat informasi pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan
- Menjadi pusat rujukan bagi panti-panti sosial milik masyarakat / swasta, terutama bagi klien yang membutuhkan pelayanan terpadu atau pengembangan kemampuan secara optimal.
- Memberikan bantuan teknis (*technical assistance*) dalam pengembangan program pelayanan panti-panti sosial milik masyarakat / swasta
- Menjadi pusat konsultasi bagi pengembangan kapasitas (*capacity building*) pelayanan panti-panti sosial milik masyarakat/ swasta
- Menjadi lembaga yang dijadikan sasaran penelitian bagi kalangan perguruan tinggi
- Menjadi sarana untuk pengembangan model-model pelayanan kesejahteraan sosial
- Mempunyai kewenangan untuk akreditasi panti-panti sosial milik masyarakat/ swasta.

J. Kesimpulan

1. Kebijakan pengembangan Panti Sosial melalui restrukturisasi organisasi dan tata kerja serta rehabilitasi sarana prasarana panti sosial, membuka peluang bagi panti untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kesejahteraan sosial secara lebih profesional, efektif, efisien.
2. Program pelayanan kesejahteraan sosial di Panti Sosial masih bertumpu pada proses pelayanan yang belum optimal memperhatikan keberagaman karakteristik fungsi sosial setiap klien.
3. Petugas panti sosial dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan lebih bertumpu pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pengalaman yang dimiliki, dan belum bertumpu pada pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial secara profesional yang seharusnya diperoleh dari pendidikan dan pelatihan.
4. Jabatan tenaga fungsional di Panti Sosial milik pemda yang belum ditetapkan secara definitif, mengakibatkan kurang jelasnya tugas fungsional dan administratif yang menjadi tanggung jawab petugas panti dan petugas administrasi (birokrasi),
5. Komitmen petugas-petugas di Panti Sosial terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, pada umumnya cukup tinggi, yang ditandai dengan adanya kesungguhan dalam memberikan pelayanan
6. Sarana prasarana yang mendukung pelayanan kesejahteraan sosial masih terbatas pada sarana prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar, sementara sarana prasarana yang dibutuhkan untuk peningkatan fungsi sosial klien masih belum cukup tersedia
7. Peran serta instansi sektoral dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan telah tampak keberadaannya, meskipun masih relatif terbatas dan bersifat insidental.

K. Rekomendasi

1. Perlunya revisi Peraturan Menteri Sosial dan Keputusan Gubernur untuk memperjelas fungsi setiap panti sosial yang sesuai dengan kategori PMKS. Menyertai perlu revisi, perlu diambil langkah-langkah:
 - a. Panti sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis perlu memiliki DIPA tersendiri. Panti perlu memiliki otorisasi dalam mengelola anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya serta dalam pengembangan pantinya.
 - b. Mempersiapkan Keputusan Gubernur yang menetapkan adanya jabatan fungsional di panti, seperti pekerja sosial, disertai tunjangan jabatan yang sesuai dengan tugas-tugas kemanusiaan yang dilaksanakan.
 - c. Mempertimbangkan adanya "Jabatan Eselon V" pada panti-panti yang menjadi cabang atau seksi yang beban kerjanya dipandang berat, mengingat tugas-tugas perawatan, bimbingan dan ketata usaha melekat pada seksi panti tersebut.
 - d. Perlu adanya penegasan kategori PMKS yang menjadi klien dengan mengacu pada karakteristik permasalahannya dan ketentuan yang ada seperti Keputusan Gubernur, agar panti tidak menangani klien yang sebenarnya bukan menjadi porsinya (contoh seperti penyandang cacat psikotik), yang pada umumnya merupakan hasil penertiban dari Dinas Trantib. Untuk itu perlu adanya pembicaraan dengan instansi terkait (Kepolisian, Kesehatan, Trantib, Diknas, dsb) guna menyepakati klien yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
2. Secara bertahap perlu dilakukan upaya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan panti, baik untuk perawatan, pemeliharaan, bimbingan, dan pelatihanserta pembinaan lanjut.
3. Guna memperlancar pelaksanaan pelayanan kepada klien perlu adanya upaya penambahan dan perbaikan sarana yang ada, seperti peralatan terapi, sarana keterampilan, ruang isolasi, ruang khusus untuk perawatan dan konsultasi, sarana kesehatan/olahraga, sarana rekreasi, peralatan kantor (termasuk komputer), dan sarana transportasi (kendaraan operasional dan bis) termasuk peralatan kesenian.

4. Guna memenuhi kebutuhan klien perlu adanya upaya peningkatan, sarana asrama dan renovasi bangunan yang kondisinya kurang layak. alam administrasi dan anggaran pelayanan, dana penunjang perlu ditingkatkan untuk klien yang memerlukan perawatan insentif; perlu anggaran untuk opname dan rujukan ke rumah sakit, perlu Juklak dan Juknis untuk pedoman kerja dan Instrumen/Formulir dari Intake Process sampai dengan penyaluran perlu segera diterbitkan
5. Untuk lebih meningkatkan kinerja panti, penambahan tenaga-tenaga fungsional seperti pekerja sosial dan perawat perlu terus diupayakan. Sejalan dengan upaya pemenuhan tenaga-tenaga fungsional tersebut, perlu diupayakan pula peningkatan pengetahuan dan kemampuan/keterampilan petugas-petugas yang ada di panti seperti instruktur, pengasuh/perawat, dsb melalui pendidikan dan pelatihan bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan dan Naker. Job training di panti-panti yang lebih maju baik milik pemerintah maupun milik swasta perlu dilakukan dalam waktu yang cukup. Disamping itu dengan memahami beban kerja petugas panti yang cukup berat dari segi kemanusiaan, perlu dipertimbangkan pula kemungkinannya untuk memberikan insentif kepada petugas.
6. Pencatatan setiap perkembangan/perubahan sikap dan perilaku serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi klien sebagai dampak dari kegiatan yang dilakukan dalam proses pelayanan, perlu ditingkatkan intensitasnya dan perlu dihimpun dalam file tersendiri tiap klien. Catatan-catatan tentang klien tersebut merupakan indikator tingkat keberhasilan pelayanan dan sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban panti, disamping berfungsi guna menetapkan langkah-langkah pembinaan selanjutnya. Sesuai dengan karakteristik permasalahan klien pada tiap-tiap panti, pencatatan tersebut mencakup aspek-aspek dari keberfungsian sosial : keberfungsian fisik, realisasi diri, sosialisasi, intregasi sosial dan produktivitas atau keberfungsian ekonomi.
7. Pembinaan lanjut sebagai tahap pelayanan panti, perlu lebih ditingkatkan jumlah dan intensitasnya. Menyadari adanya berbagai keterbatasan baik petugas, dana maupun luasnya wilayah, perlu dipertimbangkan pemantapan forum komunikasi keluarga alumni panti secara periodik dari suatu panti sebagai salah satu bentuk pemantauan, evaluasi dan pembinaan lanjut yang lebih efektif dan efisien.
8. Model penanganan PMKS melalui Panti Sosial, disarankan sebagai berikut:
 - o Model penanganan tetap berpegang pada penanganan yang baku yang berlaku untuk setiap panti, yang didalamnya mencakup kegiatan-kegiatan pelayanan yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan sejak tahap pendekatan sampai pembinaan lanjut.
 - o Proses pelayanan dalam panti yang mencakup kegiatan identifikasi sosial, rehabilitasi sosial dan bimbingan sosial hendaknya dilakukan oleh petugas sosial yang memiliki kompetensi berdasarkan latar belakang pendidikan dan latihan atau pengalaman dibidang pekerjaan sosial.
 - o Model penanganan manajemen bersifat terbuka (open system), dalam arti membuka adanya peluang intervensi/keterlibatan berbagai pihak baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, termasuk tenaga-tenaga dari berbagai profesi.
 - o Hasil akhir yang diharapkan menjadi salah satu ukuran keberhasilan masing-masing panti sosial hendaknya disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dijumpai dalam proses rehabilitasi dan pemberdayaan sosial klien yang berkaitan dengan tingkat kompleksitas permasalahan klien, potensi klien, peluang yang ada dan prospek kehidupan sosial klien selanjutnya.
 - o Teknis Pelaksanaan tiap kegiatan dalam proses pelayanan disesuaikan dengan karakteristik permasalahannya, dan setiap klien yang memerlukan teknik atau pendekatan yang berbeda. Setiap kegiatan pelayanan dilakukan oleh petugas/ tenaga fungsional yang mempunyai kompetensi untuk kegiatan tersebut.
 - o Petunjuk teknis penanganan perlu dikaji ulang agar substansinya selalu sesuai dengan perkembangan permasalahan di lapangan.

- Sebagai bagian dari upaya standarisasi Panti Sosial, perlu dilakukan survey data pendukung persiapan standarisasi, dengan mengumpulkan data tentang administrasi pelayanan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan aktivitas pelayanan sosial. Langkah-langkah strategis yang disarankan :
 - Survei data pendukung persiapan standarisasi, dengan mengumpulkan data tentang administrasi pelayanan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan aktivitas pelayanan sosial, yang akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun profil panti sosial dan bahan untuk menyusun standarisasi panti sosial.
 - Penyusunan Profil Panti Sosial, yang menyajikan informasi tentang gambaran umum lembaga, data spesifik masing-masing jenis panti sosial, indikator-indikator kemajuan sosial lembaga dan kategori Kemajuan Sosial Lembaga (KSL)
 - Standarisasi panti sosial, yang merupakan berbagai upaya pembakuan aktivitas pelayanan sosial, sumber daya manusia, sarana prasarana dan administrasi pelayanan sosial, dengan bentuk standar alternatif minimal, indikatif atau maksimal untuk setiap jenis panti sosial.
 - Penyusunan Petunjuk Teknis Standardisasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui panti / pusat pelayanan kesejahteraan sosial, yang berisi penjelasan antara lain tentang: prinsip-prinsip pelayanan, landasan yuridis formal, prosedur pendirian, program pelayanan, sumber daya manusia, administrasi pelayanan, pengembangan sarana prasarana, pembiayaan dan mekanisme pembinaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - Penataan Sistem Informasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dengan mengembangkan paket program sistem informasi panti sosial dan jaringan sistem yang dapat diakses oleh sub sistem / sistem eksternal untuk monitoring dan evaluasi Kemajuan Sosial Lembaga. Diharapkan panti sosial juga dapat berfungsi sebagai Pusat Informasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial
 - Pengadaan modul-modul intervensi pekerjaan sosial dan modul pendukung dari profesi lain bagi para pekerja sosial maupun petugas lainnya
 - Pendidikan dan Pelatihan bagi para pimpinan panti, pekerja sosial dan petugas panti lainnya, termasuk keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah (penelitian, seminar, lokakarya, dll) dalam bidang rehabilitasi sosial, bimbingan sosial, konseling, dan penyuluhan sosial, dan keterampilan teknis lainnya yang menunjang peningkatan fungsi sosial klien secara efektif.
 - Pengkajian dan uji coba model-model intervensi pekerjaan sosial dengan melibatkan pusat-pusat studi, lembaga penelitian, perguruan tinggi dan laboratorium pekerjaan sosial.
 - Pengembangan sistem referal pelayanan panti sosial terhadap sumber-sumber eksternal, sebagai kesatuan sistem pengentasan klien Untuk itu diperlukan kerjasama teknis dengan stakeholder.
 - Menumbuhkan kesadaran pengelola panti untuk menetapkan standar pelayanan kesos secara benar dan upaya secara gradual dan penyesuaian standar dilakukan dengan cara sistematis

Sumber Tulisan

- Harry Hikmat. 2003. **Kajian Penataan Panti-Panti Sosial di Lingkungan Pemda DKI.** Jakarta : Dinas Bintel Kesos
- Harry Hikmat. 2004. **Kajian Manajemen Pelayanan Panti Sosial di Lingkungan Pemda DKI. Jakarta.** Jakarta : Dinas Bintel Kesos
- Harry Hikmat dan Abas. 2005. **Penataan Manajemen PSBL di Lingkungan Pemda DKI.** Jakarta : Dinas Bintel Kesos